

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) PADA KALANGAN PELAJAR di BNNP DIY**

### ***IMPLEMENTATION OF POLICY PREVENTION AND ELIMINATION OF ABUSE AND DISTRIBUTION DARK DRUGS AMONG STUDENTS IN NATIONAL NARCOTIC AGENCY PROVINCIAL YOGYAKARTA***

Oleh : Tri Wulandari, Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Triwuland92@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada kalangan pelajar di BNN Provinsi DIY. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah kepala bidang dan seksi pencegahan pemberdayaan masyarakat staf BNNP DIY, perwakilan Dikpora DIY, dan siswa peserta sosialisasi ditentukan dengan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan pencermatan dokumen. Analisis data menggunakan teknis analisis Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian yaitu : Implementasi kebijakan P4GN di BNNP DIY meliputi tahap interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi. Hal ini ditunjukkan dengan BNNP DIY menyusun rencana strategis dan rencana kerja anggaran. Hasil interpretasi, program dengan sasaran kalangan pelajar adalah diseminasi informasi, advokasi, pembentukan kader anti narkoba, dan pemberdayaan kader anti narkoba. Pada pengorganisasian, menentukan sumberdaya manusia sebagai pelaksana, penentuan anggaran dan sarana prasarana serta pihak yang terlibat dengan menyusun proposal. Pada aplikasi, dilakukan kegiatan dengan melibatkan pelajar, kepala sekolah maupun guru yaitu sosialisasi atau *FGD*, pelatihan pembentukan kader, lomba pemberdayaan sekolah bebas narkoba.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan P4GN

#### **Abstract**

*This research aimed to described of policy prevention and elimination of abuse and distribution dark drug or P4GN in students in BNN Provincial Yogyakarta .The research is descriptive qualitative research .The subject of research is head of division prevention empowerment and a head of the community as well as staff bnp yogyakarta , determined to technique purposive .Technique data collection using interviews deep , observation and documents . Data analysis technical uses analysis Miles and Huberman which includes data collection, reduction data, presentation of data and the withdrawal of conclusion.Technique indorsement data using triangulation sources and triangulation technique.The results of the research: implementation of policy P4GN in BNNP Yogyakarta covering stage interpretation, organizing and application. This is apparent from bnp yogyakarta create a plan strategic and work plan budget.Of an interpretation program that targeted students namely the dissemination of information, advocacy, the formation of cadres anti-drug, and empowerment cadres anti-drug. Bnp of yogyakarta determine human resources as the manager , the determination of the budget and a means of infrastructure as well as parties involved by putting together a proposal .BNNP of Yogyakarta performs activities by involving students , the school principal and teachers of namely socialization or FGD , the formation of cadre training , empowerment schools competition free of drugs .*

Keyword : Implementation, Policy Of P4GN

## **PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkoba yang tanpa izin dan tidak memiliki hak menggunakan narkoba. (UU Narkotika no 35 Tahun 2009). Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia sudah sampai tingkat yang sangat memprihatinkan /mengkawatirkan. Hampir tidak ada satupun daerah/wilayah yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, bahkan korbannya telah menjangkau kesemua lapisan masyarakat. Maka pada awal tahun 2015 Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia saat ini dalam keadaan darurat narkoba.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat pada lima tahun terakhir dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar mencapai angka 797 kasus. Di tingkat Sekolah Dasar (SD) mencapai 48 kasus, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 124 kasus, Sekolah Menengah Atas (SMA) 470 kasus.

Isu kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan kalangan pelajar di Yogyakarta sudah lama terdengar oleh masyarakat dan telah menjadi perhatian publik. Berdasarkan data yang diperoleh

dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta, kasus narkoba yang melibatkan pelajar dan mahasiswa masih terjadi dari tahun ke tahun. Dari data yang diperoleh di BNNP DIY, diperoleh hasil bahwa dari tahun 2010 hingga juli 2015 ada kecenderungan peningkatan kasus narkoba pada kalangan pendidikan. Dari 460 tersangka narkoba yang ditangkap terdiri dari mahasiswa dan pelajar, 10,5% diantaranya berstatus pelajar atau kurang lebih berjumlah 48 orang.

Penanggulangan narkoba tidak terlepas dari upaya pencegahan dan pemberantasan. Merujuk pada undang-undang narkotika no 35 tahun 2009 pada Bab X, Pembinaan dan Pengawasan, pasal 60 ayat 2 tentang mencegah penyalahgunaan Narkotika, poin c yang menyatakan bahwa dibuatnya UU Narkotika untuk dapat :

mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.

Dari kutipan undang-undang tersebut, secara langsung tertulis bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dari penyalahgunaan narkoba. Hal

itu adalah perlunya pendidikan yang berkaitan tentang narkoba yang harus diberikan kepada siswa baik sekolah dasar maupun sekolah lanjutan atas.

Kebijakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) telah dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas termasuk pelajar yang melibatkan instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan Provinsi, maupun sekolah-sekolah. Namun dari data yang diperoleh masih ada kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pelajar baik pada pelajar tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Bahkan dari data yang diperoleh, menunjukkan kasus narkoba yang melibatkan pelajar cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Atas dasar itulah, peneliti ingin meneliti proses Implementasi Kebijakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) pada Kalangan Pelajar di BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta.

James E. Anderson, dalam Sudiyono (2007: 2) mengatakan kebijakan dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang diikuti oleh seseorang, atau sekelompok pelaku terkait dengan suatu permasalahan tertentu. Menurut H.A.R Tilaar (2008: 189) Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya

pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.

Implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan suatu kebijakan. Implementasi diperlukan agar kebijakan yang telah dibuat dapat terealisasi dan memberikan dampak kepada sasaran kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Arif Rohman(2009:134) mengartikan implementasi kebijakan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yakni tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Charles O. Jones dalam Arif Rohman(2009 :135) menyatakan bahwa implementasi adalah suatu aktifitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktifitas

dalam mengoperasikan program tersebut adalah : (1) *pengorganisasian*, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan; (2) interpretasi, yaitu aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan; (3) Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn implementasi kebijakan adalah sebagai sebuah abstraksi yang memperhatikan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Menurut Meter dan Horn, ada enam variabel dalam mempengaruhi kinerja implementasi, yakni; (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi (4) karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik; (6) Disposisi Implementator/sikap pelaksana (Subarsono, 2008: 99).

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya memerangi bahaya narkoba. Upaya memerangi narkoba tersebut dilakukan melalui pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba yang biasa disingkat P4GN. Dalam melaksanakan P4GN pemerintah telah mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan P4GN. Selain mengeluarkan Inpres, pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan P4GN. P4GN mempunyai arah dan tujuan serta strategi nasional (Kebijakan dan Strategi P4GN: 2014).

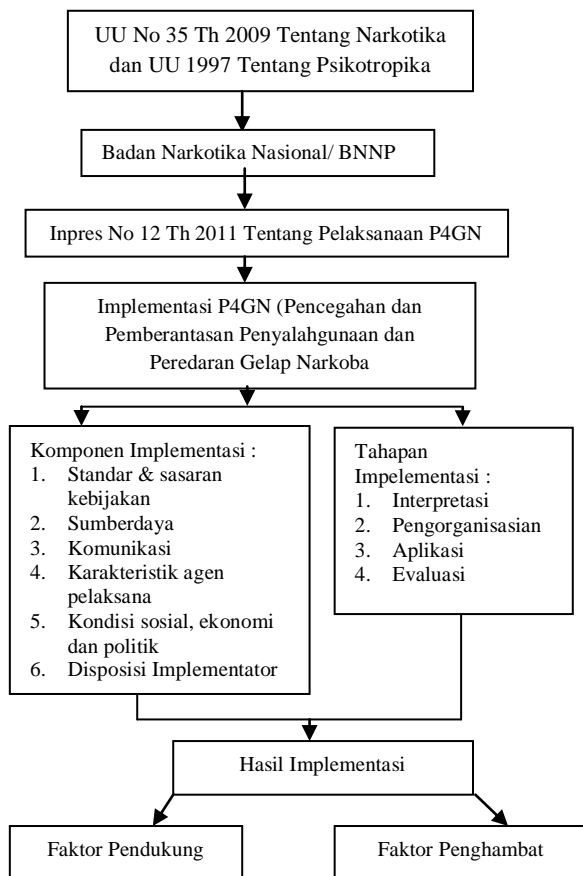
### **Kerangka Pikir Penelitian**

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Narkotika no 35 th 2009, yang didalamnya mengatur semua tentang narkoba. Untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional atau BNN. Dalam upaya memerangi narkoba pemerintah membuat kebijakan nasional dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam pelaksanaannya pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) no 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan P4GN.

Dari data-data menunjukkan adanya peningkatan kasus penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkoba di Indonesia. Oleh karena itu implementasi kebijakan P4GN perlu diteliti, untuk

mengetahui bagaimana P4GN tersebut diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan model Charles O Jones yang terdapat tiga pilar dalam implementasi yaitu interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi, serta mengambil beberapa dari komponen implementasi dari model Van Metter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi politik dan disposisi implementator. Adanya implementasi tidak terlepas dari hasil yang diperoleh serta evaluasi yang dilakukan. Serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi. Maka peneliti menggambarkan alur pikir penelitian menjadi seperti berikut :

### Bagan 1. Kerangka Pikir Penelitian



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan permasalahan yang lebih mengutamakan proses dan pemaknaan. Bogdan & Taylor (Moleong, 2005:7) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

### Jenis Penelitian

Penelitian termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang dapat diartikan sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan data data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dikarenakan peneliti ingin mengetahui gambaran ilmiah dalam implementasi kebijakan P4GN pada kalangan pelajar di BNNP DIY.

### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga April 2016. Di Badan Narkotika Nasional Provinsi DI Yogyakarta, Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta.

### **Target/Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah Kasi/staf bidang pencegahan dan bidang pemberdayaan masyarakat, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, dan siswa yang mendapat sasaran P4GN dari BNNP. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik Purposive sampling yang artinya penentuan informan/sumber data berdasarkan seleksi khusus dan kriteria tertentu. Sumber informan berjumlah 15 orang yaitu dari BNNP DIY adalah Kepala bidang Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, Kepala seksi pencegahan, Kepala seksi pemberdayaan masyarakat, staf seksi pencegahan, staf seksi pemberdayaan masyarakat, perwakilan dari Dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga DIY dan perwakilan siswa yang mengikuti program BNNP DIY. Objek penelitian adalah implementasi kebijakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan teknik pengumpulan data, maka instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah pedoman wawancara, pedoman observasi, dan lembar dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman yang meliputi Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Kebijakan P4GN Pada Kalangan Pelajar di BNNP DIY**

Suatu kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) perlu implementasi untuk mencapai tujuan dari adanya kebijakan P4GN tersebut. Dalam implementasi suatu kebijakan terdapat tiga tahapan dalam mengoperasikan kebijakan atau program, yaitu; (1) Interpretasi, (2) Pengorganisasian, dan (3) Aplikasi. Selain itu terdapat komponen yang dapat mempengaruhi implementasi yaitu : (1) Standar dan Sasaran Kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Hubungan antar Organisasi, (4) Karakteristik Agen Pelaksana, (5) Kondisi Sosial, ekonomi dan Politik, (6) Disposisi Implementator.

### **a. Interpretasi**

BNNP DIY melakukan interpretasi kebijakan P4GN dengan internal BNNP yaitu melakukan penyusunan rencana kegiatan. Selain itu BNNP DIY melakukan Bimtek untuk memberikan informasi kepada institusi dan lembaga di DIY tentang kebijakan P4GN dengan tujuan melihat potensi dan kerawanan penyalahgunaan narkoba di DIY agar dapat tepat sasaran.

Dari kegiatan interpretasi BNNP menghasilkan rencana program-program yang akan dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY. Program yang dilaksanakan sama dengan provinsi lain di Indonesia. Namun yang membedakan hanyalah sasaran prioritas program dan intensitas kegiatan yang dilakukan. Hasil dari interpretasi yaitu program yang menasar pada kalangan pelajar adalah diseminasi informasi, advokasi, pembentukan kader anti narkoba, dan pemberdayaan kader anti narkoba.

### **b. Pengorganisasian**

Dalam pengorganisasian, BNNP DIY menentukan sumberdaya manusia sebagai pelaksana dengan membentuk panitia lingkup seksi dan panitia yang melibatkan pihak luar seperti Dinas Pendidikan. Selain penentuan SDM, BNNP DIY juga menentukan anggaran

yang dialokasikan ke bidang-bidang, untuk mencairkan dana, bidang-bidang harus membuat proposal dan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang ditujukan kepada kepala BNN.

### **c. Aplikasi**

Pada aplikasi, BNNP DIY melakukan kegiatan yaitu diseminasi informasi melalui sosialisasi kepada pelajar, advokasi yang mengundang guru dan kepala sekolah, pembentukan kader anti narkoba melalui pelatihan dan pemberdayaan kader anti narkoba melalui lomba sekolah bebas narkoba.

### **d. Hasil**

Hasil dari implementasi kebijakan P4GN ini adalah semakin bertambahnya pelajar yang mendapatkan sosialisasi. Terbentuknya program-program di sekolah hasil dari diskusi guru dan kepala sekolah, terbentuknya kader anti narkoba di sekolah, dan terlaksananya program sekolah dalam rangka upaya P4GN

### **e. Evaluasi**

Evaluasi yang dilakukan oleh BNNP DIY adalah dengan mengadakan rapat evaluasi, kemudian membagikan angket kepada peserta sosialisasi dan adanya monitoring dan evaluasi oleh tim.

**f. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung implementasi kebijakan P4GN di BNNP DIY adalah adanya faktor dari dalam dan dari luar BNNP DIY. Faktor dari dalam yaitu komitmen karyawan untuk melaksanakan P4GN. Sedangkan faktor dari luar adanya dukungan dari pemerintah daerah DIY dan kerjasama yang terjalin dengan lembaga-lembaga di DIY.

**g. Faktor Penghambat**

Faktor penghambatan dari implementasi adalah dari dalam BNN dan dari luar BNNP.

**Pembahasan**

**a. Interpretasi**

Interpretasi merupakan tahap mengartikan dan menjabarkan kebijakan yang masih umum menjadi lebih teknis operasional. Interpretasi dapat juga berupa aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

Berdasarkan hasil dari data yang telah dikumpulkan, BNNP DIY tidak melakukan interpretasi pada kebijakan dan program BNN. Hal tersebut dikarenakan kebijakan dan program yang ada di BNNP DIY merupakan kebijakan dan program yang berasal dari BNN pusat. Selain itu kebijakan serta program tersebut sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Dalam melaksanakan program-program BNN, BNNP DIY memiliki kewenangan untuk membuat rencana kerja untuk satu tahun anggaran dan

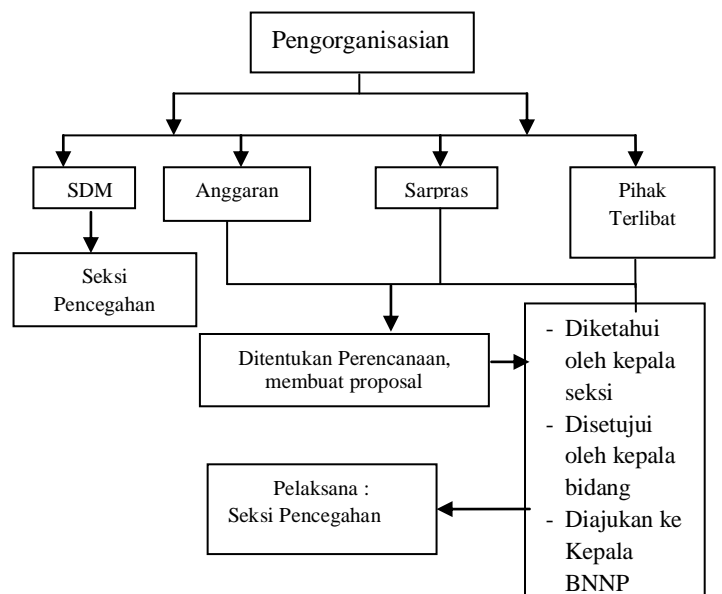
menentukan sasaran pokok dari program yang disesuaikan dengan kondisi di DIY.

Sesuai dengan teori dari Jones yang mengemukakan bahwa tahapan interpretasi pada proses implementasi merupakan penjabaran kebijakan atau program menjadi rencana agar dapat dilaksanakan, maka BNNP DIY dapat dikatakan sudah melakukan interpretasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan langkah BNNP DIY merespon kebijakan dan program dari BNN dengan membuat rencana kerja BNNP DIY dan menentukan sasaran pokok dari program.

**b. Pengorganisasian**

Berdasarkan teori implementasi, pada tahap pengorganisasian ada beberapa komponen dan tahap yang dilakukan. Diantaranya penentuan sumberdaya manusia, anggaran, sarana prasarana dan pola kepemimpinan atau koordinasi yang dilakukan. Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti menggambarkan dalam bentuk bagan berikut:

**Bagan 2. Pengorganisasian BNNP DIY**





Dari Bagan tersebut, BNNP DIY melakukan pengorganisasian di masing-masing bidang atau seksi dimana sebagai pimpinan adalah kepala bidang atau kepala seksi. Hal tersebut dikarenakan program yang ada telah sesuai dengan bidang atau seksinya. seksi yang dipimpin kepala seksi melakukan pengorganisasian terhadap sumberdaya manusia dengan mengatur staf. Seperti siapa yang membuat proposal, mengundang pembicara, mengundang peserta.

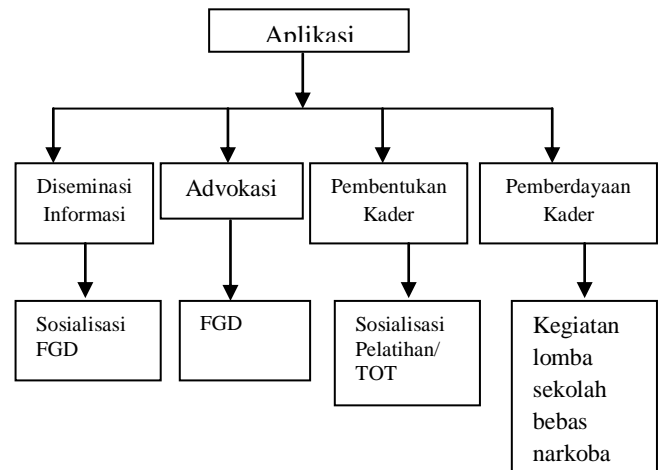
Dalam penentuan anggaran, dan sarana prasarana seksi pencegahan tidak menentukan. Hal tersebut dikarenakan anggaran, fasilitas seperti seminar kit sudah ditentukan oleh bidang perencanaan. Untuk dapat menggunakan anggaran seksi pencegahan membuat proposal yang diajukan ke kepala bidang dan kepala BNNP. Untuk menentukan sasaran sekolah mana yang akan disasar BNNP DIY melakukan kerjasama dengan beberapa pihak seperti Dinas Pendidikan maupun BNN Kabupaten.

### c. Aplikasi

Aplikasi merupakan tahapan yang penting dalam proses implementasi. Aplikasi adalah tahapan dimana program yang telah direncanakan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata. Dalam mengaplikasikan program-program, BNNP DIY melakukan kegiatan yaitu sosialisasi, FGD, pelatihan pada pembentukan kader, dan lomba sekolah bebas narkoba.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, peneliti menggambarkan tahap aplikasi program BNNP DIY dengan bagan seperti berikut :

**Bagan 3. Tahap Aplikasi Program**



### d. Hasil Implementasi

Implementasi suatu kebijakan maupun program tidak akan terlepas dari hasil. Hasil dapat menggambarkan apakah kebijakan dan program sudah terlaksana sesuai dengan tujuan dan harapan. Hasil dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung, dan hasil dapat berdampak pada jangka pendek maupun jangka panjang. Sesuai dengan tujuan dari kebijakan P4GN yang salah satunya menurunkan angka penyalahguna narkoba, hasil dari adanya kebijakan P4GN yang dilaksanakan melalui program-program untuk kalangan pelajar mempunyai hasil jangka pendek dan jangka panjang. Hasil jangka pendek dapat dilihat untuk saat ini atau beberapa tahun ke depan. Yaitu para pelajar mengetahui dan memahami bahwa narkoba

itu berbahaya dan menjadi kader/satgas anti narkoba. Namun untuk jangka panjang adalah ketika pelajar yang telah mendapat program tidak menjadi penyalaguna narkoba untuk saat ini atau untuk selamanya. Artinya program yang telah dijalankan bisa dikatakan berhasil.

#### **e. Evaluasi**

Kebijakan yang telah diaplikasikan perlu adanya evaluasi untuk mengukur sejauhmana kebijakan dilaksanakan. Selain itu evaluasi juga penting dilakukan untuk mengetahui adalah kekurangan dalam pelaksanaan dan apa tindak lanjut yang diperlukan untuk memperbaikinya. Evaluasi yang dilakukan BNNP DIY meliputi evaluasi di dalam BNNP dengan melibatkan staf BNNP dan evaluasi yang dilakukan dengan melibatkan pihak luar.

#### **f. Faktor Pendukung**

Suatu kebijakan baik itu kebijakan pemerintah pusat maupun daerah memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan diperlukan baik dari lingkungan *internal* lembaga maupun luar lembaga. Kebijakan tidak dapat dilaksanakan kalau tidak mendapatkan dukungan. Kebijakan P4GN yang dipelopori BNN mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari lembaga atau instansi di pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, maaupun institusi pendidikan.

Faktor dari dalam, secara sumberdaya manusia yang berada didalam lembaga BNN memiliki kemauan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan BNN. Selain itu

semua aspek yang dibutuhkan untuk melaksanakan program sudah mendapat alokasi dari pemerintah pusat, jadi tidak perlu khawatir mengenai dana atau sarana prasarana.

Dari luar lembaga, BNNP DIY mendapatkan dukungan daru Pemerintah daerah DIY dengan adanya Peraturan daerah ataupun Peraturan gubernur yang mengatur bagaimana P4GN dapat dilaksanakan di DI Yogyakarta. Selain itu adanya kerjasama yang terjalin dengan pihak luar BNNP.

#### **g. Faktor Penghambat**

Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi adalah faktor dari dalam dan luar BNNP. faktor dari dalam adalah banyaknya program yang tidak didukung oleh jumlah sumberdaya manusia. Faktor dari luar adalah partisipasi peserta program, yang terkadang tidak tepat sasaran.

### **Kesimpulan**

1. Implementasi kebijakan P4GN di BNNP DIY meliputi tahap interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi. Hal ini ditunjukkan dengan BNNP DIY menyusun rencana strategis dan rencana kerja anggaran. Dari interpretasi program yang menysasar pada kalangan pelajar yaitu diseminasi informasi, advokasi, pembentukan kader anti narkoba, dan pemberdayaan kader anti narkoba. BNNP DIY menentukan sumberdaya manusia sebagai pelaksana, penentuan anggaran dan

sarana prasarana serta pihak yang terlibat dengan menyusun proposal. BNNP DIY melakukan kegiatan dengan melibatkan pelajar, kepala sekolah maupun guru yaitu sosialisasi atau *FGD*, pelatihan pembentukan kader, lomba pemberdayaan sekolah bebas narkoba. Hasil dari implementasi adalah bertambahnya peserta yang mendapatkan sosialisasi, terbentuknya kader anti narkoba, dan sekolah yang membuat program dalam upaya P4GN.

### Saran

1. Hendaknya BNNP DIY bisa membuat jejaring dengan sekolah-sekolah untuk memudahkan koordinasi. Selain itu BNNP DIY dapat menjalin kerjasama dengan Dipora DI Yogyakarta untuk memetakan sekolah mana yang belum disasar, sehingga program bisa tepat sasaran.
2. Peneliti memberikan rekomendasi untuk saran yaitu adanya program seperti pengembangan diri untuk orang yang berindikasi menggunakan narkoba.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatana.
- Abdul Wahab S. (1997). *Analisis Kebikjasanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebikjasanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2014). Diakses melalui [bnnp-diy.com](http://bnnp-diy.com). Pada tanggal 31 Desember 2015. Jam 11.15 WIB.

Djam'an Satori dan Aan Komariah. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.

H.A.R Tilaar & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Joko Widodo. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.

Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2013 Edisi Tahun 2014.

\_\_\_\_\_. Kebijakan dan Strategi Nasional di bidang P4GN. (2012). Diakses melalui <http://bnn.go.id/portal/uploads/post/2012/01/26/20120126130403-10111.pdf>. Pada tanggal 31 Desember 2015. Jam 13.40 WIB.

Lexy J. Moeleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Mathew B.Miles dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. UI Press.

Perda DIY Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba/ Napza.

Peraturan Presiden No 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. (2010). Diakses melalui [http://www.bnn.go.id/portal/uploads/perundangan/2010/04/12/perpres\\_no\\_23\\_thn\\_2010.pdf](http://www.bnn.go.id/portal/uploads/perundangan/2010/04/12/perpres_no_23_thn_2010.pdf). Pada tanggal 31 Desember 2015. Jam 13.15 WIB

Peraturan Presiden No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan P4GN. (2010). Diakses melalui <http://www.bnn.go.id/po>

[portal/uploads/perundangan/2010/04/12/perpres\\_no\\_23\\_thn\\_2010.pdf](http://portal/uploads/perundangan/2010/04/12/perpres_no_23_thn_2010.pdf). pada tanggal 31 Desember 2015. Jam 13.10 WIB.

———— Ringkasan Eksekutif Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 16 Provinsi di Indonesia Tahun 2011. Diakses melalui <http://bnn.go.id/portal/uploads/post/2012/05/29/20120529145032-10261.pdf>. Pada tanggal 28 September 2015. Jam 13.15 WIB.

Riant Nugroho. (2011). Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Pendidikan). Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudiyono. (2007). *Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Undang-undang Narkotika No 35 Tahun 2009. (2009). Diakses melalui <http://www.bnn.go.id/portal/uploads/perundangan/2009/10/27/uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok.pdf>. Pada tanggal 16 Oktober 2015. Jam 10.40 WIB.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. (2012). diakses melalui <http://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/UU20-2003-Sisdiknas.pdf>. Pada 19 Maret 2015. Jam 09.55 WIB.

William N. Dunn. (1999). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.